

## ABSTRAK

**Akbar Fadilah (1228010018):** Manajemen Risiko Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Fenomena pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung menghadirkan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks dalam konteks pengelolaan ketertiban umum. Di satu sisi, PKL menjadi bagian dari ekonomi informal yang menopang penghidupan masyarakat, namun di sisi lain keberadaannya menimbulkan persoalan tata ruang, keselamatan publik, dan stabilitas sosial. Pelaksanaan kebijakan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung seringkali berhadapan dengan potensi konflik, resistensi pedagang, serta risiko operasional dan reputasional yang memerlukan pengelolaan secara sistematis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan manajemen risiko dalam kebijakan penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Bandung berdasarkan tujuh tahapan manajemen risiko menurut James Lam, yaitu penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, komunikasi dan konsultasi, serta pemantauan dan peninjauan.

Penelitian ini menggunakan teori manajemen risiko James Lam (2017) sebagai pisau analisis utama, yang memandang manajemen risiko sebagai proses terstruktur, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam tata kelola organisasi. Kerangka tersebut diterapkan untuk menilai sejauh mana praktik penertiban PKL telah selaras dengan prinsip manajemen risiko modern dalam konteks kebijakan publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis tematik dilakukan dengan mengklasifikasikan temuan ke dalam tujuh tahapan manajemen risiko.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manajemen risiko dalam penertiban PKL telah dijalankan secara substantif melalui pertimbangan situasional, pendekatan persuasif, serta evaluasi operasional, namun belum terdokumentasi secara formal dalam sistem manajemen risiko yang terstruktur. Dengan demikian, penguatan aspek formalisasi, dokumentasi, dan integrasi manajemen risiko ke dalam prosedur operasional menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan legitimasi kebijakan penertiban PKL di Kota Bandung.

**Kata Kunci:** Manajemen Risiko, Penertiban PKL, Kebijakan Publik, Kota Bandung